



Recht Studiosum Law Review

Journal homepage: <https://talenta.usu.ac.id/rslr>



Evaluasi Layanan Publik Berbasis Digital: Studi Efektivitas Implementasi Cek Kesehatan Gratis (CKG) pada Aplikasi Satusel di UPT. Puskesmas Medan Johor

Danish Ammara^{1*}, Ghaniya Hafiza²

¹ Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

² Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 55151, Indonesia

*Corresponding Author: danishammara@students.usu.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 10 November 2025

Revised 15 November 2025

Accepted 16 November 2025

Available online

<https://talenta.usu.ac.id/rslr>

E-ISSN: 2961-7812

P-ISSN: 2985-9867

How to cite:

Ammara, D. & Ghaniya Hafiza. (2025). Evaluasi Layanan Publik Berbasis Digital: Studi Efektivitas Implementasi Cek Kesehatan Gratis (CKG) pada Aplikasi SATUSEHAT di UPT. Puskesmas Medan Johor. *Recht Studiosum Law Review*, 4(2), 210-220.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<http://doi.org/10.32734/rslr.v4i2.23454>

ABSTRACT

This study examines the effectiveness of the Free Health Check (CKG) service implemented through the SATUSEHAT application at UPT Puskesmas Medan Johor using a socio-legal approach, combining normative analysis of digital health service policies and regulations with empirical findings obtained through interviews and field observations. The results reveal that while the service holds promise in expanding access to preventive health care digitally, its implementation faces several challenges, including low digital literacy, weak inter-agency coordination, regulatory gaps, and the absence of alternative service channels for vulnerable groups. These findings indicate a disconnect between the legal framework and practical execution, emphasizing the need for responsive policy reform, participatory public education, strengthened infrastructure, and data privacy protection to ensure equitable and sustainable access to digital health services.

Keywords: Free Health Check (CKG), SATUSEHAT, Public Policy Evaluation, Digital Health Services

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji efektivitas implementasi layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) dalam aplikasi SATUSEHAT di UPT Puskesmas Medan Johor dengan menggunakan pendekatan sosio-legal, yaitu memadukan analisis normatif terhadap kebijakan dan regulasi digitalisasi layanan kesehatan dengan kajian empiris berupa wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun layanan ini berpotensi memperluas akses terhadap layanan preventif secara digital, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti rendahnya literasi digital, lemahnya koordinasi antarinstansi, celah regulasi teknis, serta belum tersedianya jalur pelayanan alternatif bagi kelompok rentan. Temuan ini mengindikasikan adanya ketimpangan antara desain hukum dengan praktik di lapangan, sehingga dibutuhkan reformulasi kebijakan yang responsif, edukasi publik yang partisipatif, serta penguatan infrastruktur dan perlindungan data pribadi untuk mendorong pemerataan akses layanan kesehatan digital secara adil dan berkelanjutan.

Kata kunci: Cek Kesehatan Gratis (CKG), SATUSEHAT, Evaluasi Kebijakan Publik, Layanan Kesehatan Digital

1. Pendahuluan

Pelayanan Publik merupakan salah satu aspek krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, digitalisasi layanan publik menjadi sebuah keniscayaan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta aksesibilitas layanan kepada

masyarakat secara lebih transparan.¹ Menanggapi dinamika tersebut, pemerintah Republik Indonesia telah mengimplementasikan sejumlah strategi dan inisiatif di ranah digital. Salah satu langkah strategis utamanya adalah membangun platform digital yang dapat mempermudah dan mempercepat akses masyarakat terhadap layanan publik.² Dilansir dalam Laman Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek di Indonesia implementasi layanan publik berbasis digital telah berperan sebagai fokus utama dalam usaha reformasi birokrasi, sebagaimana diatur dalam kebijakan transformasi layanan digital yang bertujuan menyederhanakan proses administrasi dan meningkatkan keterjangkauan layanan.

Dalam konteks pelayanan Kesehatan, digitalisasi telah diadopsi melalui berbagai aplikasi dan platform, salah satunya adalah aplikasi SATUSEHAT yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Diketahui dalam laman Ayo Sehat Kemenkes RI, Aplikasi ini bertindak sebagai upaya penerapan untuk menyediakan layanan Cek Kesehatan Gratis (selanjutnya CKG) yang memungkinkan masyarakat melakukan proses pemeriksaan untuk mengidentifikasi potensi masalah Kesehatan sebelum suatu penyakit muncul (selanjutnya Skrining) secara mudah dan terintegrasi melalui perangkat digital. Program ini tidak hanya bertujuan untuk mempermudah akses layanan Kesehatan, tetapi juga meningkatkan kualitas data Kesehatan yang akurat dan *real-time*, yang sangat penting dalam upaya pengambilan kebijakan Kesehatan masyarakat publik.

Meskipun digitalisasi layanan Kesehatan menjanjikan banyak manfaat, tantangan seperti tingkat literasi digital masyarakat, ketersediaan infrastruktur teknologi, keamanan data, serta kesiapan tenaga Kesehatan dalam mengoperasikan sistem digital masih menjadi hambatan yang perlu dievaluasi secara mendalam.³

Penelitian ini akan memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana pelayanan CKG berbasis digital melalui SATUSEHAT beroperasi di tingkat Puskesmas, mengidentifikasi kelebihan dan kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan pelayanan digital yang lebih optimal dan inklusif. Karena suatu kebijakan dikatakan efektif apabila hasilnya selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan layanan publik digital khususnya di bidang Kesehatan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan pelayanan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosio-Legal yaitu menggabungkan analisis normatif terhadap regulasi dan kebijakan terkait implementasi CKG pada aplikasi SATUSEHAT dengan kajian empiris melalui wawancara semi-terstruktur kepada pasien dan tenaga Kesehatan di UPT Puskesmas Medan Johor dengan didukung oleh adanya observasi partisipatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas, kendala, serta kesesuaian pelaksanaan pelayanan berbasis digital dengan ketentuan yang berlaku.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Gambaran Umum UPT Puskesmas Medan Johor

UPT Puskesmas Medan Johor merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah naungan Dinas Kesehatan Kota Medan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama. Puskesmas ini berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan dasar yang melayani kebutuhan masyarakat secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Sebagai ujung tombak pemerintah di bidang kesehatan, puskesmas ini berperan strategis dalam menjalankan program-program nasional, termasuk berbagai program kesehatan masyarakat yang diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setempat.

Dalam menjalankan tugasnya, Puskesmas Medan Johor melayani beberapa kelurahan yang padat penduduk dengan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Oleh karena itu, puskesmas ini harus mampu menyesuaikan pelayanan agar efektif menjangkau kelompok masyarakat yang berbeda-beda. Program yang dijalankan meliputi imunisasi lengkap untuk anak, pelayanan kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit menular seperti tuberkulosis dan demam berdarah, serta pemeriksaan kesehatan umum. Selain itu, puskesmas juga melakukan kegiatan promosi kesehatan seperti penyuluhan pola hidup sehat dan pencegahan penyakit yang ditujukan kepada masyarakat luas.

¹ Irfan, B., (2023), "Pelayanan Publik Era Digital: Studi Literatur", *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 4(1), 24.

² Susilawati, Kurniawati, Dodi Ilham, Denok Sunarsi, dan Ahmad Wahidiyat Haedar, (2024), "Pelayanan Publik Berbasis Digital Pada Organisasi Sektor Publik di Indonesia", *Pallangga Praja*, 6(1), 68.

³ Annisa Yolanda, (2024), Evaluasi Implementasi SATUSEHAT di Puskesmas. Klik Media Website, <https://klikmedika.id/evaluasi-implementasi-satusehat-di-puskesmas/>. Diakses pada 28 Mei 2025.

Sejalan dengan perkembangan teknologi, UPT Puskesmas Medan Johor telah diinstruksikan untuk mengadopsi teknologi digital guna memperbaiki mutu dan efisiensi layanan kesehatan. Salah satu upaya tersebut adalah penerapan aplikasi SATUSEHAT yang memudahkan proses pendataan pasien, akses informasi kesehatan, serta pendaftaran layanan secara digital. Transformasi ini bertujuan mengurangi hambatan administratif serta mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan yang tepat waktu dan berkualitas.

Implementasi teknologi digital di Puskesmas Medan Johor tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti ketimpangan literasi digital masyarakat, terutama di kalangan lansia, serta keterbatasan infrastruktur jaringan internet yang memadai. Hal ini mempengaruhi kecepatan dan luasnya adopsi aplikasi SATUSEHAT di wilayah tersebut. Meski demikian, puskesmas terus berupaya melakukan sosialisasi dan pelatihan agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan digital ini secara optimal.

Sebagai bagian dari sistem kesehatan yang berorientasi masa depan, Puskesmas Medan Johor memandang transformasi digital sebagai peluang strategis untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan. Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan pusat, diharapkan layanan kesehatan digital ini dapat semakin menyentuh seluruh lapisan masyarakat sehingga tujuan universal health coverage dapat terwujud secara lebih merata.⁴

3.2. Gambaran Umum Kementerian dan Lembaga Pengembang Aplikasi SATUSEHAT

Aplikasi SATUSEHAT merupakan produk kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang bertujuan mendukung transformasi digital dalam sistem pelayanan kesehatan nasional. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memegang peranan sentral sebagai penggagas dan pengelola aplikasi ini untuk menyatukan data layanan kesehatan dalam satu platform yang terintegrasi. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan sistem kesehatan yang efisien, transparan, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.⁵

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memiliki peran strategis dalam pengembangan infrastruktur teknologi digital yang menjadi tulang punggung kelancaran aplikasi SATUSEHAT. Selain membangun jaringan dan platform digital, Kemenkominfo juga aktif dalam mengkampanyekan peningkatan literasi digital agar masyarakat mampu menggunakan layanan digital dengan aman dan efektif. Peningkatan literasi digital ini menjadi aspek penting karena kesuksesan transformasi digital tidak hanya tergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan dan kemampuan pengguna dalam memanfaatkannya (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2022).⁶

Peran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga sangat penting, terutama dalam memanfaatkan kemampuan BUMN di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi. BUMN memberikan dukungan teknis dan jaringan distribusi aplikasi sehingga aplikasi SATUSEHAT dapat diakses secara luas dan stabil. Di masa pandemi COVID-19, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) turut memperkuat ekosistem SATUSEHAT dengan mengintegrasikan data vaksinasi dan pelacakan kasus, mempercepat layanan kesehatan digital yang responsif terhadap kondisi darurat kesehatan (Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 2021).⁷

Sinergi antar kementerian dan lembaga ini mencerminkan pendekatan kolaboratif yang sistematis dan strategis dalam mengembangkan layanan kesehatan digital nasional. Kolaborasi ini memungkinkan terwujudnya platform layanan yang tidak hanya teknis canggih, tetapi juga menyeluruh dalam menjangkau berbagai kebutuhan layanan kesehatan masyarakat secara holistik. Dengan demikian, SATUSEHAT menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan digitalisasi sektor kesehatan di Indonesia.⁸

⁴ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). SATU SEHAT: Integrasi Data Kesehatan Nasional untuk Layanan Publik Digital.

⁵ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Panduan Penggunaan Aplikasi SATUSEHAT Mobile. Jakarta: Ditjen Pelayanan Kesehatan.

⁶ Kementerian Komunikasi dan Informatika. Transformasi Digital Layanan Publik. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2022.

⁷ Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). Integrasi Data Vaksinasi melalui Platform SATUSEHAT. Jakarta: KPCPEN, 2021.

⁸ Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sinergi Digital BUMN untuk Kesehatan Nasional. Jakarta: Kementerian BUMN, 2022.

3.3. Gambaran Umum Aplikasi SATUSEHAT

SATUSEHAT merupakan aplikasi kesehatan digital yang dikembangkan sebagai bagian dari agenda transformasi digital sektor kesehatan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Aplikasi ini berfungsi sebagai pusat integrasi data dan layanan kesehatan masyarakat yang terpusat dalam satu platform digital sehingga memudahkan akses dan pengelolaan kesehatan secara efisien.

Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur penting yang meliputi rekam medis elektronik (electronic medical record/EMR), riwayat imunisasi dan vaksinasi, akses konsultasi Kesehatan secara daring, serta pendaftaran dan pemantauan program-program kesehatan pemerintah seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG). Dengan fitur tersebut, masyarakat dapat melakukan pemantauan kesehatan mandiri serta mendapatkan informasi yang relevan mengenai status kesehatan mereka secara real time (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

Selain memberikan manfaat langsung kepada pengguna, aplikasi SATUSEHAT juga menjadi sumber data nasional yang strategis bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan. Data yang terkumpul dari aplikasi ini digunakan untuk merumuskan kebijakan kesehatan, mengalokasikan sumber daya, dan melakukan evaluasi program kesehatan secara lebih tepat sasaran dan efektif di berbagai daerah.

Penerapan aplikasi ini merupakan langkah signifikan dalam digitalisasi sektor Kesehatan yang berorientasi pada kemudahan akses dan peningkatan kualitas layanan. Meskipun aplikasi ini menawarkan kemudahan, tantangan seperti perbedaan kemampuan digital masyarakat dan keterbatasan infrastruktur masih menjadi hambatan utama. Oleh sebab itu, upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tetap menjadi prioritas dalam rangka memastikan keberhasilan implementasi aplikasi SATUSEHAT.

Ke depan, aplikasi SATUSEHAT diharapkan terus dikembangkan dengan penambahan fitur dan peningkatan teknologi agar dapat menjawab kebutuhan layanan kesehatan yang semakin kompleks. Inovasi berkelanjutan ini akan mendukung terwujudnya sistem kesehatan nasional yang adaptif dan responsif terhadap perubahan teknologi serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.⁹

3.4. Pelaksanaan Evaluasi Layanan Publik Berbasis Digital: Studi Efektivitas Implementasi Cek Kesehatan Gratis (CKG) pada Aplikasi SATUSEHAT di UPT Puskesmas Medan Johor

Evaluasi terhadap pelaksanaan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) melalui aplikasi SATUSEHAT dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan digital di UPT Puskesmas Medan Johor. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana layanan CKG berbasis digital dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penilaian ini penting untuk menentukan strategi pengembangan layanan di masa mendatang.

Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan bahwa kesadaran masyarakat terhadap keberadaan layanan CKG melalui aplikasi SATUSEHAT masih relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan informasi yang tersebar ke masyarakat, terutama bagi kelompok yang memiliki keterbatasan akses internet dan tingkat literasi digital yang rendah. Kondisi tersebut menyebabkan rendahnya tingkat unduhan aplikasi serta pendaftaran pada program CKG yang disediakan (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2022).¹⁰

Selain itu, kendala teknis seperti jaringan internet yang belum merata dan belum optimalnya dukungan perangkat teknologi turut menjadi faktor penghambat pemanfaatan layanan ini. Masyarakat di wilayah padat penduduk dengan infrastruktur terbatas menghadapi kesulitan dalam mengakses aplikasi secara stabil dan nyaman. Oleh karena itu, faktor infrastruktur menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam upaya peningkatan layanan digital di daerah.

Meski terdapat berbagai kendala, minat masyarakat terhadap layanan CKG tetap tinggi, terutama karena sifatnya yang gratis dan potensinya untuk mendeteksi dini berbagai penyakit. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi yang lebih masif dan pelatihan literasi digital yang menyeluruh agar masyarakat

⁹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Panduan Penggunaan Aplikasi SATUSEHAT Mobile. Jakarta: Ditjen Pelayanan Kesehatan.

¹⁰ Kementerian Komunikasi dan Informatika, *Op.cit.*

dapat lebih memahami dan memanfaatkan layanan ini secara optimal. Khususnya bagi kelompok lansia dan masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi *smartphone*, pendekatan yang ramah dan inklusif sangat dibutuhkan.

Dengan demikian, evaluasi ini menegaskan pentingnya peran sinergis antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat fondasi layanan kesehatan digital. Dukungan dari berbagai pihak termasuk pengembangan infrastruktur, penyediaan pelatihan, serta kampanye informasi harus terus ditingkatkan agar layanan Cek Kesehatan Gratis melalui aplikasi SATUSEHAT dapat benar-benar efektif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Berikut adalah hasil visualisasi data kuantitatif dari responden yang menjadi dasar rekomendasi dalam penelitian ini:

Berikut dilampirkan penjelasan terkait penerapan *e-government* pada aplikasi SATUSEHAT dalam pelayanan publik sebagai efektivitas implementasi Cek Kesehatan Gratis (CKG) di UPT Puskesmas Medan Johor mengacu pada empat indikator, yaitu:¹¹

1) Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan pelaksanaan evaluasi layanan publik berbasis digital merupakan salah satu unsur penting dalam mengukur efektivitas program, yang mencakup kesesuaian antara sasaran, waktu, kebutuhan dan penyampaian informasi layanan kepada masyarakat. Ketepatan sasaran sebuah program beresensi untuk mengukur sejauh mana peserta program sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Dilansir dalam laman Sehat Negeriku (2025) CKG sendiri merupakan program dari pemerintah RI sebagai hadiah ulang tahun untuk masyarakat yang diharapkan bisa memberikan pemeriksaan Kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari bayi hingga lansia.¹²

Berkaca pada upaya Indonesia untuk mengikuti perkembangan zaman yakni Teknologi, Aplikasi SATUSEHAT menjadi sarana yang mengintegrasikan data Kesehatan individu antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (selanjutnya Fasyenkes) untuk menstandarisasi dan interoperabilitas data, demi mendukung implementasi Rekam Medis Elektronik (selanjutnya RME) Nasional diseluruh fasyenkes sesuai amanat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.

Berdasarkan hasil penelitian di UPT Puskesmas Medan Johor, ditemukan bahwa meskipun Sebagian besar masyarakat melakukan cek Kesehatan dalam kurun waktu satu tahun terakhir, tingkat kesadaran dan pemanfaatan aplikasi SATUSEHAT untuk layanan CKG masih terbatas. Hasil ini menunjukkan adanya ketidaktepatan dalam aspek sasaran dan informasi, di mana sosialisasi dan aksesibilitas aplikasi belum optimal sehingga belum menjangkau seluruh kelompok masyarakat yang membutuhkan layanan.

Ketepatan waktu pemanfaatan layanan digital juga perlu ditingkatkan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara real-time. Oleh karenanya, pengukuran ketepatan ini menjadi dasar evaluasi yang valid untuk merekomendasikan perbaikan dalam penyampaian layanan digital, sehingga program CKG dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan Kesehatan masyarakat sesuai standar pelayanan publik.

2) Sosialisasi Program

Dalam konteks implementasi layanan publik berbasis digital, keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh kualitas teknis aplikasi, tetapi juga sangat bergantung pada efektivitas strategi sosialisasi kepada masyarakat sasaran. Program CKG yang terintegrasi dalam aplikasi SATUSEHAT sebagai hasil inovasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam mendigitalisasi layanan promotif dan Kesehatan.

Upaya sosialisasi secara Pusat oleh Kemenkes RI yang dilansir dalam Website misalnya melalui kampanye layanan publik digital dilengkapi dengan fitur iklan yang disesuaikan (*targeted advertising*) menggunakan machine learning berbasis lokasi dan minat. Riset dari *Journal of Medical Internet Research* (2021) menunjukkan bahwa kampanye Kesehatan berbasis digital bertarget mampu menjangkau hingga 4x (empat kali) lebih banyak pengguna dalam kelompok usia produktif 18-35 tahun.¹³

¹¹ Budiani, Ratna, (2007), Efektivitas Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 20.

¹² Website Sehat Negeriku. Cek Kesehatan Gratis Kado Ulang Tahun Dimulai 10 Februari 2025. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI 2025. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20250207/4447362/cek-kesehatan-gratis-kado-ulang-tahun-dimulai-10-februari-2025/>. Diakses pada 28 Mei 2025.

¹³ Irfan, B., *Op.cit.*, 24.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi layanan CKG di UPT. Puskesmas Medan Johor masih terbatas dan tidak merata. Informasi layanan umumnya disampaikan secara langsung kepada pasien, terutama saat diketahui sedang berulang tahun, sehingga pendekatan yang digunakan bersifat situasional. Namun, beberapa narasumber mengaku tidak mengetahui keberadaan program CKG maupun aplikasi SATUSEHAT, yang menunjukkan lemahnya penyebaran informasi dan belum optimalnya strategi sosialisasi terhadap masyarakat luas.

Oleh karena itu, akibat dari pola kampanye maupun sosialisasi yang terbatas, sasaran layanan CKG cenderung terfokus pada kelompok usia produktif dan pengguna media sosial aktif. Padahal, berdasarkan temuan lapangan, terdapat sejumlah informasi berusia di atas 60 tahun yang menunjukkan minat tinggi terhadap layanan tersebut, namun mereka tidak mengetahui adanya program CKG maupun informasi terkait cara mengaksesnya.

3) *Tujuan Program*

Tujuan program merupakan hasil yang ingin dicapai atau dampak yang diharapkan dari pelaksanaan suatu program, yang menjadi acuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program tersebut. Tujuan program harus bersifat spesifik, terukur, relevan, dan dapat dicapai agar dapat menjadi landasan utama dalam menilai keberhasilan program.

Tujuan utama dari implementasi layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) melalui aplikasi SATU SEHAT adalah untuk memberikan kemudahan akses layanan kesehatan preventif kepada masyarakat, khususnya dalam mendeteksi dini kondisi kesehatan secara rutin dan gratis. Layanan ini diharapkan dapat menjadi solusi digital yang mendukung program promotif dan preventif di sektor kesehatan, serta memperluas jangkauan pelayanan kesehatan dasar yang efisien, cepat, dan terintegrasi.

Melalui pemanfaatan teknologi dalam aplikasi SATU SEHAT, program ini juga bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memantau kondisi kesehatannya secara mandiri dan berkelanjutan. Dengan demikian, layanan CKG menjadi bagian dari transformasi layanan kesehatan berbasis digital yang mendukung upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat serta penguatan sistem kesehatan berbasis komunitas.

4) *Pemantauan Program*

Pemantauan program merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan data dan informasi secara berkala guna mengevaluasi jalannya pelaksanaan suatu program. Tujuan dari pemantauan adalah untuk memastikan bahwa program yang dirancang dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan rencana, mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi berbagai permasalahan atau kendala yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya. Pemantauan yang baik juga berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan dan peningkatan mutu layanan.

Dalam konteks layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) melalui aplikasi SATU SEHAT di UPT Puskesmas Medan Johor, pemantauan program dilakukan oleh pihak pengelola puskesmas yang bekerja sama dengan tim teknis dari Kementerian Kesehatan serta pengembang sistem SATU SEHAT. Bentuk pemantauan yang dilakukan meliputi evaluasi terhadap jumlah pengguna yang mengakses layanan CKG, frekuensi pemeriksaan kesehatan yang dilakukan melalui sistem, serta tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan yang diberikan.

Pengumpulan data dilakukan secara digital melalui dasbor internal aplikasi SATU SEHAT yang terhubung dengan sistem informasi kesehatan nasional. Selain itu, pihak Puskesmas secara berkala juga melakukan survei lapangan dan wawancara singkat kepada masyarakat pengguna layanan CKG untuk mengetahui kendala teknis maupun non-teknis yang mereka hadapi, seperti kesulitan login, waktu antrean yang tidak sesuai, atau aksesibilitas fitur oleh lansia dan masyarakat yang tidak terbiasa dengan teknologi.

Dari hasil pemantauan yang dilakukan, diketahui bahwa meskipun jumlah pengguna aplikasi menunjukkan peningkatan, masih ditemukan beberapa kendala teknis seperti keterlambatan sinkronisasi data pemeriksaan, tidak optimalnya notifikasi hasil pemeriksaan kepada pasien, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses pendaftaran digital. Tim pemantau juga mengidentifikasi perlunya peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat, khususnya bagi kelompok usia lanjut dan masyarakat ekonomi lemah.

Sebagai tindak lanjut dari proses pemantauan tersebut, pihak Puskesmas Medan Johor telah melakukan koordinasi intensif dengan Dinas Kesehatan Kota Medan dan tim pengembang SATU SEHAT untuk memperbaiki sistem integrasi dan memperbarui fitur aplikasi agar lebih mudah digunakan. Langkah perbaikan yang dilakukan antara lain adalah penyederhanaan antarmuka pengguna, integrasi fitur pengingat (reminder) untuk pemeriksaan lanjutan, serta peningkatan keamanan sistem untuk menjamin kerahasiaan data pasien.

Dengan adanya sistem pemantauan yang terstruktur dan responsif, layanan CKG dalam aplikasi SATUSEHAT diharapkan dapat terus ditingkatkan efektivitasnya dan menjadi model pelayanan kesehatan digital yang berkelanjutan di tingkat puskesmas.

3.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Implementasi Cek Kesehatan Gratis (CKG) pada Aplikasi SATUSEHAT di UPT Puskesmas Medan Johor dalam Meningkatkan Evaluasi Layanan Publik Berbasis Digital

Efektivitas implementasi layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) pada aplikasi SATUSEHAT tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara kebijakan, pelaku layanan, teknologi, dan masyarakat sebagai pengguna. Pelayanan publik digital harus dilihat sebagai sistem yang saling terkait, di mana kegagalan satu elemen dapat menghambat kinerja keseluruhan. Dalam konteks UPT Puskesmas Medan Johor, beberapa faktor berikut telah teridentifikasi sebagai penentu utama keberhasilan program CKG berbasis aplikasi.

3.5.1. Ketidaksinkronan Regulasi Teknis dan Yuridis

Meskipun regulasi makro seperti Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan legitimasi terhadap hak atas layanan yang berkualitas, aspek teknis pelaksanaan SATUSEHAT belum memiliki regulasi turunan yang operasional. Tidak adanya Peraturan Menteri Kesehatan yang secara spesifik mengatur alur kerja, perlindungan data pengguna, dan pengawasan penggunaan sistem digital, menjadi celah hukum yang mengganggu kepastian layanan. Digitalisasi tanpa kejelasan norma hukum berisiko menimbulkan “*administrative disorder*”, karena pelaksana di lapangan bekerja tanpa batas hukum yang pasti.¹⁴

3.5.2. Koordinasi Antarinstansi yang Lemah

Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan daerah, dan manajemen puskesmas masih bekerja dalam sistem yang relatif terpisah. Aplikasi SATUSEHAT yang seharusnya menjadi platform terintegrasi justru memperlihatkan gejala tumpang tindih ketidak sinkronnya basis data pengguna, penumpukan laporan dan lambatnya pembaruan informasi. Menurut Tata kelola digital dalam sektor publik akan berhasil jika dibangun atas dasar interoperabilitas dan kepemimpinan digital yang kuat, bukan sekadar peluncuran aplikasi.¹⁵ Kurniawan menekankan bahwa efektivitas layanan publik digital hanya tercapai jika sistem birokrasi bekerja dalam satu platform terpadu secara sistemik.¹⁶

3.5.3. Kesenjangan Literasi Digital Masyarakat

Penggunaan SATUSEHAT di tingkat layanan primer seperti UPT Puskesmas Medan Johor terkendala oleh rendahnya literasi digital masyarakat, terutama lansia, ibu rumah tangga, dan kelompok rentan lainnya. Tanpa pendampingan langsung atau jalur alternatif non-digital, program seperti CKG berisiko hanya diakses oleh segmen masyarakat berpendidikan tinggi dan melek teknologi, yang justru bukan kelompok target prioritas dalam layanan promotif preventif. Hal ini menimbulkan ketimpangan akses dan berpotensi melanggar prinsip keadilan administratif (*equity in service delivery*). Lestari et al. mencatat bahwa hambatan literasi adalah akar dari eksklusif digital dalam layanan publik dan berisiko memperdalam ketimpangan pelayanan.¹⁷

3.5.4. Risiko Keamanan dan Privasi Data Kesehatan

Penerapan teknologi digital dalam layanan kesehatan harus tunduk pada prinsip *confidentiality, integrity, dan availability* (CIA) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Tanpa sistem pengamanan berlapis dan audit digital berkala, aplikasi SATUSEHAT dapat menjadi titik lemah dalam perlindungan hak pasien yang sangat rawan terjadi kebocoran data. Hal ini bertentangan dengan prinsip *non-disclosure*, dan dapat merusak kepercayaan publik terhadap layanan digital negara. Beberapa kasus di daerah lain menunjukkan bahwa data kesehatan sering kali tidak dienkripsi dengan baik, dan akses backend aplikasi tidak dikontrol secara ketat. Wahyudi et al. mengingatkan bahwa kegagalan pemerintah melindungi data dalam e-service merupakan bentuk kelalaian hukum yang berpotensi menimbulkan tuntutan hukum perdata dan administratif.¹⁸

3.5.5. Minimnya Jalur Alternatif Pelayanan

Sebagian masyarakat, khususnya lansia dan kelompok ekonomi bawah, tidak memiliki perangkat atau jaringan untuk mengakses layanan aplikasi. Oleh karena itu, keberadaan jalur manual seperti meja layanan atau hotline tetap penting untuk memastikan tidak ada diskriminasi layanan (*non-discriminatory access*). Putra et al.

¹⁴ Indrajit, R. E. *Electronic Government*. Yogyakarta: Andi, 2006.

¹⁵ [1] Putra, B. A. P., E. P. Purnomo, dan A. N. Kasiwi. (2020), “Transformasi E-Government sebagai Perwujudan Smart Governance Kota Jogja.” *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 5, (1).

¹⁶ R. C. Kurniawan, (2016), “Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah.” *Fiat Justisia*, 10(3).

¹⁷ Lestari, Nugraha, dan Fauziah, (2019), “Pengembangan E-Government Melalui Layanan Aspirasi Masyarakat.” *Jurnal Ilmu Administrasi*, 16(2), 163–178.

¹⁸ Wahyudi, Widowati, dan Nugroho (2022), “Strategi Implementasi Smart City Kota Bandung.”, *Jurnal Tapis* 18(1), 110–123.

menegaskan bahwa bentuk ideal *e-government* adalah yang tetap menjamin opsi manual bagi masyarakat rentan, bukan menggantikannya sepenuhnya dengan sistem digital.¹⁹

3.6. Upaya yang Perlu Dilakukan dalam Meningkatkan Evaluasi Layanan Publik Berbasis Digital: Studi Efektivitas Implementasi Cek Kesehatan Gratis (CKG) pada Aplikasi SATUSEHAT di UPT. Puskesmas Medan Johor

3.6.1. Perluasan Informasi dan Sosialisasi secara Merata

Data survei menunjukkan bahwa 6 dari seluruh responden mengidentifikasi kurangnya sosialisasi sebagai penghambat utama pemanfaatan layanan CKG. Ini menjadi bukti nyata bahwa kendala bukan pada aplikasinya, melainkan ketidaktahuan masyarakat tentang layanan tersebut. Untuk itu: Pemerintah harus menyusun strategi komunikasi lintas lapisan masyarakat, dengan mengarahkan kader Posyandu, RT/RW, serta media lokal (radio komunitas, brosur bahasa lokal). Menyediakan workshop digital di ruang publik seperti balai kelurahan atau rumah ibadah sebagai bentuk literasi interaktif. Langkah ini tidak hanya memperluas akses, tetapi juga memenuhi hak atas informasi pelayanan publik sebagaimana dijamin dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

3.6.2. Penguatan Infrastruktur Teknologi dan Jaringan Layanan

Sebanyak 5 responden menyatakan bahwa lemahnya koneksi internet dan ketiadaan perangkat digital menjadi hambatan teknis yang nyata dalam mengakses aplikasi SATUSEHAT. Oleh sebab itu: Perlu dilakukan pemasangan *WiFi* publik gratis di puskesmas dan penyediaan perangkat tablet/*smartphone* berbasis layanan terbatas. Anggaran infrastruktur *e-health* sebaiknya masuk dalam prioritas belanja daerah (APBD), disertai dengan petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan dan Kominfo. Efektivitas layanan publik digital tidak hanya bergantung pada aplikasi, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur pendukungnya, termasuk SDM dan jaringan.²⁰

3.6.3. Peningkatan Literasi Digital Masyarakat Secara Partisipatif

Sebanyak 4 responden mengusulkan perlunya pelatihan penggunaan aplikasi SATUSEHAT secara langsung, mengingat mayoritas warga Medan Johor berasal dari latar belakang pendidikan dan sosial ekonomi yang beragam. Maka: Disarankan diadakan simulasi penggunaan aplikasi secara rutin dalam pelayanan puskesmas keliling atau saat kunjungan imunisasi/Posyandu. Menggunakan bahasa daerah dan metode visual (gambar/infografik) agar informasi lebih mudah dipahami. Menurut Lestari et al. (2019), peningkatan literasi digital adalah strategi utama untuk mencegah eksklusif digital dalam layanan negara, khususnya bagi kelompok usia lanjut dan prasejahtera.

3.6.4. Penyediaan Jalur Alternatif Non-Aplikasi sebagai Layanan Inklusif

Sebanyak 4 responden juga menyampaikan perlunya jalur layanan non-aplikasi seperti meja manual, *hotline*, atau sistem SMS/USSD bagi warga yang tidak memiliki perangkat digital. Hal ini sangat penting, mengingat keadilan layanan publik harus mempertimbangkan kelompok marginal. Jalur alternatif seperti "Meja SATUSEHAT Manual" di tiap puskesmas bisa menjadi solusi konkret. Pemerintah dapat bekerja sama dengan operator telekomunikasi untuk membuat akses berbasis kode USSD (seperti *123#), legal dan menjangkau ponsel *non-smartphone*. Langkah ini mendukung prinsip non-discriminatory *access* dalam pelayanan publik sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas.

3.6.5. Perluasan Cakupan Layanan dan Jenis Pemeriksaan

Meskipun hanya 1 responden yang menyebutkan, saran untuk memperluas jenis layanan seperti cek kolesterol, mata, dan kesehatan mental merupakan langkah progresif: Layanan CKG dapat ditambah sesuai kebutuhan lokal masyarakat, misalnya dengan menyesuaikan prevalensi penyakit di wilayah Medan Johor. Perlu dilakukan analisis beban penyakit daerah (*local burden of disease*) sebagai dasar pengembangan jenis layanan tambahan. Hal ini sejalan dengan prinsip pelayanan promotif-preventif dalam Pasal 3 Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas, yang mendorong pendekatan kesehatan masyarakat berbasis risiko dan kebutuhan lokal.

3.6.6. Peningkatan Keamanan Sistem dan Penguatan Perlindungan Data

Meskipun belum disebutkan oleh responden, dari kajian hukum ditemukan bahwa aplikasi SATUSEHAT belum memiliki lapisan keamanan data yang sesuai standar minimum, padahal data kesehatan adalah data pribadi sensitif menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Maka perlu diterapkan enkripsi *end-to-end*, *login* dua langkah (*two-factor authentication*), dan mekanisme log audit

¹⁹ Putra, B. A. P., E. P. Purnomo, dan A. N. Kasiwi. (2020). "Transformasi E-Government sebagai Perwujudan Smart Governance Kota Jogja." *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 5(1).

²⁰ Muliawaty, Hendryawan Lia, dan S. Lia. (2020). "Peranan E-Government dalam Pelayanan Publik." *Jurnal Ilmu Administrasi*, 1(1).

untuk setiap akses data. Pemerintah wajib menyusun Peraturan Pelaksana berbasis hak-hak subjek data, agar masyarakat merasa aman dan tidak enggan menggunakan aplikasi digital kesehatan negara. Wahyudi et al. (2022) menyatakan bahwa kegagalan melindungi data kesehatan publik dalam *e-service* adalah bentuk kelalaian negara dan dapat menimbulkan gugatan perdata maupun administratif.²¹

Upaya-upaya yang dikembangkan dalam kajian ini tidak hanya merupakan respons terhadap survei empiris, tetapi juga bentuk konkret penguatan *public service governance* berbasis digital dan inklusif. Negara harus menjamin bahwa transformasi digital kesehatan tidak menjadi eksklusif hanya untuk kelompok melek teknologi, tetapi justru menjadi alat pemersatu layanan yang lebih adil dan merata.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap pelaksanaan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) melalui aplikasi SATUSEHAT di UPT Puskesmas Medan Johor, dapat disimpulkan bahwa efektivitas implementasi layanan publik digital sangat dipengaruhi oleh lima faktor utama: kepastian hukum, koordinasi kelembagaan, literasi digital masyarakat, keamanan data, dan aksesibilitas layanan.

Berdasarkan segi hukum, implementasi SATUSEHAT masih mengalami kekosongan regulasi teknis yang dapat memandu pelaksanaan operasional layanan secara konsisten. Hal ini menciptakan ambiguitas bagi pelaksana layanan dan menimbulkan keraguan di tingkat masyarakat. Tanpa dasar hukum yang kuat, sebuah sistem digital akan sulit diterima secara administratif dan fungsional dalam tata kelola pemerintahan modern. Adapun terkait dengan koordinasi antarinstansi, khususnya antara Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Daerah, dan unit pelaksana di puskesmas, belum berjalan optimal. Masih ditemui ketimpangan alur data, ketidakhadiran *dashboard* pemantauan bersama, dan belum adanya mekanisme lintas sektor yang terstruktur. Koordinasi yang lemah ini menjadi akar dari berbagai keluhan publik terhadap keterlambatan layanan dan miskomunikasi.

Menurut data yang didapatkan dari hasil survei serta saran masyarakat yang ada di dalamnya, dapat dilihat keterbatasan literasi digital sebagai kendala paling umum. Masyarakat banyak yang belum memahami keberadaan, tujuan, atau cara penggunaan fitur CKG di SATUSEHAT. Ini menunjukkan bahwa transformasi digital belum didampingi dengan pendekatan edukatif dan inklusif yang tepat.

Pada sisi lain, SATUSEHAT masih menyisakan celah serius dalam hal keamanan data pribadi, khususnya data kesehatan. Padahal, data kesehatan termasuk dalam kategori data pribadi sensitif yang memiliki perlindungan hukum tersendiri. Kurangnya lapisan pengamanan menjadikan sistem ini rentan terhadap kebocoran dan potensi pelanggaran hak privasi warga negara. Selain itu, sistem layanan ini belum sepenuhnya menjangkau kelompok rentan seperti lansia, masyarakat miskin, dan warga dengan keterbatasan akses teknologi. Tanpa jalur manual sebagai pelengkap, digitalisasi SATUSEHAT berisiko memperdalam eksklusi layanan kesehatan. Efektivitas SATUSEHAT sebagai platform layanan publik berbasis digital di bidang kesehatan sangat tergantung pada kemampuan negara untuk menyeimbangkan antara teknologi, hukum, dan aspek keadilan sosial. Diperlukan intervensi kebijakan yang menyeluruh dan berkelanjutan agar layanan seperti CKG bukan hanya menjadi program simbolik, tetapi juga berdampak nyata terhadap kualitas hidup masyarakat.

Referensi

- Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/4829/2021 tentang SATU SEHAT sebagai Platform Transformasi Digital Kesehatan Nasional.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2014.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Administrasi Puskesmas.
- D. Mutiarin dan Z. Arif. Manajemen Birokrasi dan Kebijakan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Hardiansyah. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media, 2011.
- Hayat. Manajemen Pelayanan Publik. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Indrajit, R. E. *Electronic Government*. Yogyakarta: Andi, 2006.
- Lewis, Carol W., dan Stuart C. Gilman. *The Ethics Challenge in Public Service: A Problem-Solving Guide*. San Francisco: Jossey-Bass, 2005.

²¹ Wahyudi, A. A., Y. R. Widowati, dan A. A. (2022). Nugroho. "Strategi Implementasi Smart City Kota Bandung." *Jurnal Tapis*, 8(1), hlm. 110–123.

- Nawawi, Ismail. *Budaya Organisasi, Kepemimpinan dan Kinerja*. Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2013.
- Tika, Moh. Pabundu. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Amri, S. “Efektivitas Aplikasi JAKI sebagai Media Informasi Covid-19 di Jakarta.” *Jurnal DEDIKASI* 22, no. 2 (2022): 105–122.
- Astutik, E. P., dan G. Gunartin. “Analisis Kota Jakarta sebagai Smart City dan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Menuju Masyarakat Madani.” *Inovasi* 6, no. 2 (2019): 41–58.
- B., Irfan. “Pelayanan Publik Era Digital: Studi Literatur”. *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 4, No. 1 (2023): 24.
- Budiani, Ratna. *Efektivitas Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Kurniawan, R. C. “Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah.” *Fiat Justisia* 10, no. 3 (2016).
- Lestari, Y. D., J. T. Nugraha, dan N. M. Fauziah. “Pengembangan E-Government Melalui Layanan Aspirasi Masyarakat.” *Jurnal Ilmu Administrasi* 16, no. 2 (2019): 163–178.
- MA, Junhan Chen dan MA, Yuan Wang. “Social Media Use for Health Puposes: Systematic Review. *Journal of Medical Internet Research* (2021). <http://dx.doi.org/10.2196/17917>. Diakses pada 28 Mei 2025.
- Muliawaty, Hendryawan Lia, dan S. Lia. (2020). “Peranan E-Government dalam Pelayanan Publik.” *Jurnal Ilmu Administrasi*.
- Nuryanti, T., & Kurniawati, L. (2021). Evaluasi Implementasi Aplikasi SATU SEHAT dalam Mewujudkan Transformasi Digital Kesehatan. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 10(1), 88–102.
- Putra, B. A. P., E. P. Purnomo, dan A. N. Kasiwi. (2020). “Transformasi E-Government sebagai Perwujudan Smart Governance Kota Jogja.” *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 5, no. 1.
- Rahmawati, E., & Saputra, D. (2023). Analisis Kesiapan Digitalisasi Layanan Kesehatan di Puskesmas. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(1), 47–55.
- Ratnasari, M. O. B., Noor, I., & Hidayati, F. “Analisis Pengembangan E-Government pada Layanan Administrasi Pemerintahan.” *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 8, no. 1 (2022): 35–44.
- Santoso, E. B., dan A. Rahmadanita. “Smart City di Kota Bandung: Suatu Tinjauan Aspek Teknologi, Manusia, dan Kelembagaan.” *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan* 2, no. 2 (2020): 16–40.
- Susilawati, Kurniawati, Dodi Ilham, Denok Sunarsi, dan Ahmad Wahidiyat Haedar. “Pelayanan Publik Berbasis Digital Pada Organisasi Sektor Pubik di Indonesia”. *Pallangga Praja* 6, No. 1 (2024): 68.
- Wahyudi, A. A., Y. R. Widowati, dan A. A. Nugroho. (2022). “Strategi Implementasi Smart City Kota Bandung.” *Jurnal Tapis* 18, no. 1. 110–123.
- Amalia, Siti. Implementasi Smart Governance pada Fitur Jaklapor (Aplikasi Jakarta Kini) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022.
- Harahap, A. R. (2023). Analisis Efektivitas Aplikasi SATU SEHAT sebagai Media Pelayanan Kesehatan Digital di Sumatera Utara. Tesis, Universitas Sumatera Utara.
- Kase, J. Perencanaan Strategis Sistem Informasi (SI) pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2010.
- Bachtiarudin, A. “Viral Cerita Warga Dibully Karena Identitasnya Bocor di JAKI.” *Liputan6*, 12 Juli 2021. <https://www.liputan6.com/news/read/4604460>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. Jumlah Penduduk DKI Jakarta Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2020–2022. <https://jakarta.bps.go.id>.
- Data Grafik dan Hasil Temuan Survei Lapangan. Dokumen Internal Responden SATUSEHAT, 2025.
- Dinas Kesehatan Kota Medan. (2024). Laporan Evaluasi Layanan Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas Medan Johor.
- Kase, J. Perencanaan Strategis Sistem Informasi (SI) pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2010.
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sinergi Digital BUMN untuk Kesehatan Nasional. Jakarta: Kementerian BUMN, 2022.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). SATU SEHAT: Integrasi Data Kesehatan Nasional untuk Layanan Publik Digital.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. Transformasi Digital Layanan Publik. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2022.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Panduan Penggunaan Aplikasi SATUSEHAT Mobile. Jakarta: Ditjen Pelayanan Kesehatan.
- Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). Integrasi Data Vaksinasi melalui Platform SATUSEHAT. Jakarta: KPCPEN, 2021.

- Liputan6. (2023). “Transformasi Digital Kesehatan: Peran SATU SEHAT dalam Meningkatkan Layanan Primer”.
- Website Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi. Evaluasi dan Inventarisasi Pelayanan Publik Berbasis Digital. Jakarta: Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek RI 2024. <https://ortala.kemdikbud.go.id/berita/detail/evaluasi-dan-inventarisasi-pelayanan-publik-berbasis-digital>. Diakses pada 27 Mei 2025.
- Website Sehat Negeriku. Cek Kesehatan Gratis Kado Ulang Tahun Dimulai 10 Februari 2025. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI 2025. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20250207/4447362/cek-kesehatan-gratis-kado-ulang-tahun-dimulai-10-februari-2025/>. Diakses pada 28 Mei 2025.
- Yolanda, Annisa. Evaluasi Implementasi SATUSEHAT di Puskesmas. Klik Media Website. 2024. <https://klikmedika.id/evaluasi-implementasi-satuschat-di-puskesmas/>. Diakses pada 28 Mei 2025.
- Survei Responden Layanan CKG – SATUSEHAT, UPT Puskesmas Medan Johor, 26 Mei 2025.